

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkiraan yang penting bagi keberlangsungan kegiatan sebuah organisasi, termasuk sektor publik, baik itu untuk keperluan rumah tangganya maupun untuk menjalankan aktivitas organisasi yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut anggaran. Anggaran dapat diartikan sebagai alat perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang telah diperkirakan untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Dalam mengelola anggaran tersebut, diperlukan sistem yang dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan penganggaran suatu kementerian/lembaga supaya memperoleh hasil yang optimal. Dengan demikian, perlu adanya sistem penganggaran yang tepat bagi pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut.

Pemerintah Indonesia menetapkan komitmen dalam mengoptimalkan segala pengeluaran sebagai perwujudan kualitas pembangunan dan kesejahteraan yang baik. Komitmen ini diwujudkan dengan adanya transformasi sistem penganggaran nasional dari yang berbasis input menjadi berbasis kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Indonesia menerapkan penganggaran berbasis kinerja, yang dimana

kementrian/lembaga melaksanakan pengukuran dan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Pemerintah Indonesia menganut sistem anggaran tradisional atau *line item budgeting* sebelum adanya perubahan menjadi anggaran berbasis kinerja. Perbedaan sistem ini dengan sistem *performance budgeting* terletak pada keluaran yang dihasilkannya. Jika sistem anggaran sebelumnya lebih menekankan pada aspek moneter, maka anggaran berbasis kinerja lebih mengedepankan output dari anggaran yang telah dikeluarkan. Pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja tidak hanya bertumpu pada anggaran yang menunjang pada aktivitas *stakeholder*-nya, melainkan anggaran secara keseluruhan yang telah direncanakan sebelumnya untuk membiayai seluruh kegiatan kementrian/lembaga yang bersangkutan. Maka, diharapkan sistem ini dapat menjadikan Pemerintah Indonesia lebih baik lagi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Namun implementasi dari transformasi sistem penganggaran ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, sebab masih adanya permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga perlu adanya akuntabilitas pada pemerintahan untuk memantau pelaksanaannya supaya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pemerintah wajib melakukan pertanggungjawaban pada apa yang telah dilakukannya yang biasa disebut akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilakukan oleh organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategik yang memerlukan keahlian antara sumber dayanya agar mampu menjawab tuntutan global. Selain itu, dilakukannya pengukuran kinerja agar dapat

melihat sejauh mana ketercapaian dari suatu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, diadakannya evaluasi atas capaian kinerja yang selanjutnya dilaporkan kepada publik. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dimana pencapaian kerjanya menjadi sorotan publik sehingga perlu adanya pelaporan atas segala aktivitas yang telah dilakukan pada setiap tahunnya, dari mulai anggaran yang dikelola hingga pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi dinas yang sangat penting dalam setiap pencapaian kerjanya karena bersangkutan langsung dengan aspek kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dalam memberikan pelayanannya. Sehingga, Dinas Kesehatan menjadi prioritas kedua setelah Dinas Pendidikan dalam menerima pengalokasian APBD Kota Bandung pada tahun 2018. Dibandingkan Dinas Pendidikan Kota Bandung, penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung mengalami naik turun pada tahun 2016 sampai 2018, namun dengan pencapaian kinerja yang hampir semua memenuhi target. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penganggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Dinas Kesehatan Kota Bandung telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggarannya. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran yang telah disusun dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta dapat meningkatkan integritas unit dalam melakukan

pertanggungjawabannya pada apa yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi tersebut.

Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dimana kinerjanya menjadi sorotan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2016 sampai 2018, belum menunjukkan indikasi pencapaian target anggaran yang menyeluruh pada pelaksanaannya, seperti tabel berikut.



Tabel 1. 1
Data Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung

Keterangan	Tahun Anggaran					
	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BELANJA	297.056.7	274.035.4	401.276.2	332.321.9	460.243.6	413.619.5
OPERASI	58.693,00	50.806,00	03.627,86	78.068,00	84.348,00	87.402,00
Belanja Pegawai	103.152.3 38.932,00	99.752.41 7.864,00	190.956.4 69.825,00	187.953.4 05.712,00	196.614.8 71.599,00	193.458.4 62.073,00
Belanja Barang dan Jasa	193.904.4 19.761,00	174.283.0 32.942,00	210.319.7 33.802,86	144.368.5 72.356,00	263.628.8 12.749,00	220.161.1 25.329,00
BELANJA	49.904.11	41.545.91	32.078.04	24.402.06	44.357.40	25.392.06
MODAL	7.008,00	4.425,00	3.642,00	7.700,00	0.530,00	9.450,00
Belanja Peralatan dan Mesin	24.337.01 2.708,00	19.819.89 8.652,00	16.311.86 9.631,00	13.092.66 7.500,00	12.969.66 5.869,00	8.674.974. 387,00
Belanja Gedung dan Bangunan	25.163.35 4.300,00	21.340.78 1.173,00	12.770.56 6.689,00	11.309.40 0.200,00	31.378.47 7.580,00	16.717.09 5.063,00

Dipindahkan

						Pindahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	403.750.000,00	385.234.600,00	2.995.607.322,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	346.960.875.701,00	315.581.365.231,00	433.354.247.269,86	356.724.045.768,00	504.601.084.878,00	439.011.656.852,00
%	90,95		82,31		87,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung (diolah peneliti)

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kesehatan Kota Bandung di atas, fenomena yang terjadi berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang belum terealisasi dengan optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari selisih antara anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2016 sampai 2018. Anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi masih kurang dalam penyerapannya. Pada anggaran 2016 serapan anggaran mencapai tingkat presentase 90,95%. Pada tahun 2017 serapan anggaran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung mengindikasikan adanya penurunan dari tahun sebelumnya sampai 82,31%. Dan pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Bandung menyerap anggaran lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya peningkatan menjadi 87,00%. Sehingga penyerapan anggaran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuatif. Maka kinerja

penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung masih kurang optimal.

Hasil dari observasi awal, peneliti mendapat informasi dari salah satu *staff* bagian keuangan, Bapak Maulvi, yang menuturkan ada beberapa faktor yang menjadikan penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung kurang optimal, di antaranya penggunaan anggaran yang dilaksanakan seefisien mungkin, menjadikan anggaran yang telah dialokasikan tidak terealisasi secara menyeluruh. Penemuan harga yang lebih miring ketika di lapangan dibandingkan harga yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Minimum (SBM) menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran. Sehingga, anggaran yang telah direncanakan tidak diserap semua. Adapun waktu pelaksanaan pun menjadi faktor terjadinya *performance gap* pada anggaran, dimana Dinas Kesehatan Kota Bandung terhambat dengan keterbatasan waktu dalam melaksanakan program atau kegiatan sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Seperti data yang disajikan pada tabel di atas, pada tahun 2017 belanja jalan, irigasi, dan jembatan telah dianggarkan, namun pada pelaksanaannya tidak terealisasi, sehingga anggarannya masih utuh. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kinerja dari Dinas Kesehatan Kota Bandung yang masih kurang optimal dalam menyusun rencana anggaran maupun dalam pelaksanaan. Maka dari itu, perlu dilaksanakannya evaluasi kinerja dan beberapa perbaikan untuk ke depannya.

Anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung harus memenuhi konsep *value for money* (ekonomi, efisien, dan efektif). Ekonomi disini lebih menitikberatkan pada *input* (masukan). Aspek ini merupakan pengkonversian antara sumber daya berupa anggaran menjadi berupa bahan untuk menghasilkan output dengan biaya seminimal mungkin sehingga tidak melebihi target realisasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung juga harus bersifat efisien. Efisien berkaitan dengan hubungan output yang berupa produk yang dihasilkan dari pengelolaan input yang digunakan. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output dengan input serendah-rendahnya. Aspek ketiga yaitu efektif, dimana hal ini merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya atau hubungan antara output dengan tujuan. Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat dikatakan efektif apabila semua indikator sasaran pada misi yang dilakukan dapat dicapai dengan optimal sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, Dinas Kesehatan Kota Bandung belum menunjukkan adanya optimalisasi kinerja anggaran dengan orientasi ekonomi, efisien, dan efektif seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2
Data Capaian Misi 1 Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kota Bandung

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2018			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Dengan Dukungan Sumber Daya Kesehatan	Angka Kematian Ibu (Konversi)	64.94	75.3	84.00	381,298,711,184.00	284,811,272,088.40	74.7	24.76
		Angka Kematian Bayi (Konversi)	27.8	23.8	114.38				
		Presentase Bayi Gizi Buruk	0.38	0.38	100.00				
Jumlah					99.46	381,298,711,184.00	284,811,272,088.40	74.7	24.76

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bandung (diolah peneliti)

Tabel 1. 3
Data Capaian Misi 2 Sasaran 2 Dinas Kesehatan Kota Bandung

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2018			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2	Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.02	85.04	100.0	121,735,843,0	88,998,381,805.0	73.11	26.91

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Bandung (diolah peneliti)

Berdasarkan data tabel capaian kinerja di atas dapat terlihat, semua misi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung belum terealisasi dengan optimal. Pada misi 1 sasaran 1, Dinas Kesehatan Kota Bandung merealisasikan anggaran belanja kegiatan dengan presentase 74.7%. Sedangkan pada misi 2 sasaran 2, realisasi belanja Dinas Kesehatan Kota Bandung mencapai 73.11%. Hal ini mengindikasikan Dinas Kesehatan Kota Bandung telah mencapai tingkat ekonomi dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja dilihat dari anggaran yang terealisasi tidak melebihi target anggaran yang telah direncanakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari data tabel di atas dapat terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Bandung mencapai tingkat efisiensi sebesar 24,76% untuk misi 1 sasaran 1 dan 26,91% untuk misi 2 sasaran 2. Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan dapat dikatakan telah efisien. terlihat dari perbandingan presentasi total keluaran yang melebihi 100% yang lebih besar dibandingkan presentase input yaitu anggaran yang dibawah 100%. Maka dapat diperoleh tingkat efisiensi dengan menghitung nilai selisih antara

keduanya. Semua misi yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung telah dilaksanakan seluruhnya. Namun, dalam realisasinya Dinas Kesehatan Kota Bandung belum mencapai sesuai target yang telah ditentukan. Terlihat pada indikator angka kematian ibu yang mencapai angka 75,3 dari target sebesar 64,94 sehingga presentase pencapaiannya hanya sebesar 84,00%. Artinya, angka penekanan pada kematian ibu melahirkan masih tinggi. Berdasarkan LAKIP tahun 2018, peneliti mendapat informasi bahwa salah satu penyebab dari ketidaktercapaian indikator ini adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan rumah sakit dan klinik dalam melaporkan kasus kematian ibu melahirkan di Kota Bandung yang *under reported* menyebabkan angka kematian ibu terus meningkat. Hal ini mengindikasikan kurangnya akuntabilitas pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang mengakibatkan anggaran berbasis kinerja yang diterapkan belum optimal.

Berdasarkan pada paparan di atas, maka peneliti tertarik meneliti mengenai apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas di Dinas Kesehatan Kota Bandung, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah yaitu sebagai berikut.

1. Penyerapan anggaran yang telah dialokasikan belum dilakukan secara optimal, sehingga masih adanya sisa anggaran di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2016-2018.
2. Ketidaktercapain target indikator kinerja pada misi 1 dan sasaran 1, sehingga menimbulkan kurangnya optimalisasi pada penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2018.
3. Kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan unit kesehatan seperti rumah sakit dan klinik dalam melaporkan kasus kematian ibu melahirkan di Kota Bandung yang *under reported* yang menyebabkan angka kematian ibu terus meningkat pada tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh dimensi efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi efektivitas dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi ekonomi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui besarnya dimensi efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya dimensi efektivitas dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya dimensi ekonomi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan telaah dan penambah khasanah keilmuan Administrasi Publik terutama untuk konsentrasi Keuangan Publik yang secara khusus mengkaji mengenai anggaran berbasis kinerja dan.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Penulis

- a) Mendapatkan gambaran langsung mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap.

- b) Sebagai bahan informasi dan empiris bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - c) Untuk menambah wawasan secara teoritis maupun praktis dalam kajian Administrasi Publik serta sebagai bahan penerapan pengetahuan mengenai teori yang dikaji oleh penulis dengan fakta di lapangan.
- b. Untuk Instansi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi instansi pemerintahan termasuk Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta dalam peningkatan kinerja untuk kedepannya.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori anggaran berbasis kinerja yang dikemukakan oleh Bastian (2010:202) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem pengorganisasian yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.

Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai ukuran output sebagai indikator kinerja organisasi. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi sektor publik harus menekankan pada indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil). Dimana ketiga hal itu merupakan komponen dari konsep *value for money* (ekonomi, efisien, dan

efektif). Maka dimensi-dimensi dari teori anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut (Bastian, 2010: 61):

1. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

2. Efektivitas

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

3. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input.

Sedangkan menurut (Mahmudi, 2015: 16) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principal*). Adapun menurut Hoopwood dan Tomkins (1984; Elwood, 1993) dalam (Mahmudi, 2015: 9-11) dimensi-dimensi yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

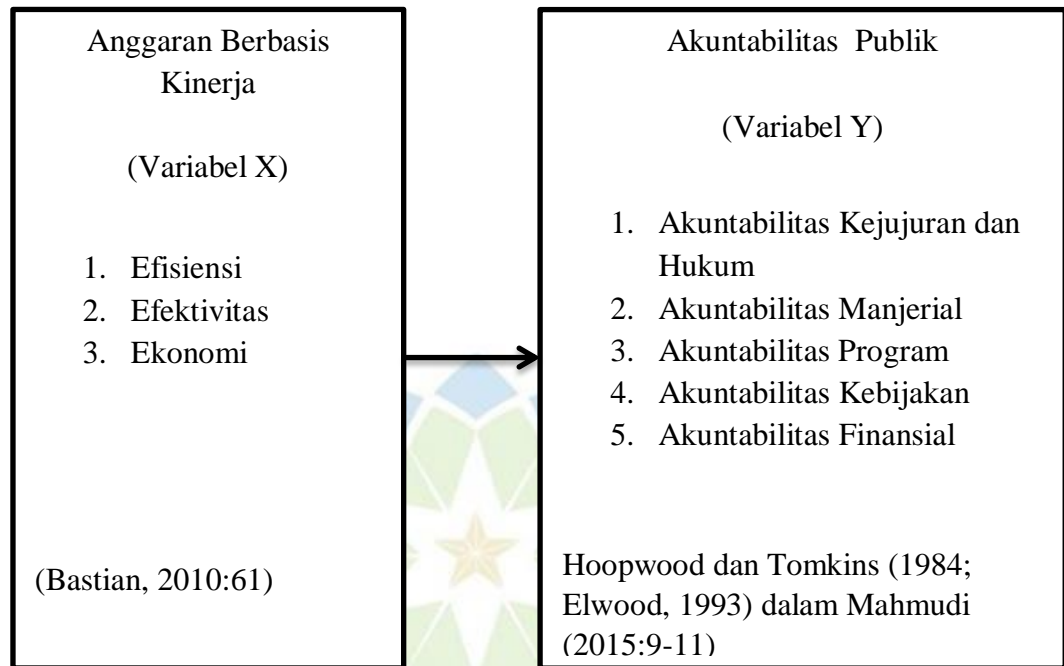
Teori atau konsep penghubung dari kedua variabel di atas adalah teori yang dikemukakan oleh Halim mengenai pengukuran kinerja.

(Halim, 2012: 128) mengatakan bahwa:

“Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang public tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (konsep *value for money*).”

Berdasarkan pada teori di atas, bahwa setiap organisasi sektor publik wajib melakukan pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan kepada masyarakat, baik itu mengenai kinerja/manajerial ataupun finansial dengan menekankan konsep akuntabilitas publik. Dimana anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu alat ukur dalam penilaian kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mewujudkan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut adalah gambaran teori yang digunakan penulis dalam merumuskan kerangka pemikiran.



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017: 70) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_a : Terdapat pengaruh dimensi efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_o : Tidak terdapat pengaruh dimensi efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_a : Terdapat pengaruh dimensi efektivitas dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_o : Tidak terdapat pengaruh dimensi efektivitas dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_a : Terdapat pengaruh dimensi ekonomi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_o : Tidak terdapat pengaruh dimensi ekonomi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_a : Terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung

H_o : Tidak terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bandung